



BKPSDM

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2025.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini sebagai rancangan teknokratik atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan pada Rencana Strategik (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru sesuai dengan visi dan misi Bupati Kotabaru terpilih periode tahun 2021-2026 yang akan dituangkan dalam RPJMD.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Kotabaru, Juli 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



H. MUHAMAD YUSUF, S.Pd
NIP. 19661109 198503 1 001
Pembina Tk. I (IV/b)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	63
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	65
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	73
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	74
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	83
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rumusan Program dan Kegiatan	87
4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan.....	87
BAB V PENUTUP	99



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
Tabel 2.2.1	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.2.2	:	Cakupan data di masing masing bidang pada BKPSDM Kabupaten Kotabaru
Tabel 2.4	:	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Tabel 2.5	:	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Tabel 3.2	:	Tujuan dan Sasaran BKPSDM
Tabel 4.1	:	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Bagan alir tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- Gambar 1.2 : Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya (RKPD, Renstra Perangkat Daerah) serta tindak lanjut penyusunan APBD



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru adalah merupakan rencana tahunan yang berjangka 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru tahun 2025.

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia 2021-2026.

Renja Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 memberi gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, Indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru selama Tahun Anggaran 2025, dan sebagai pengukur capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun institusi wadah organisasi. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.



Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

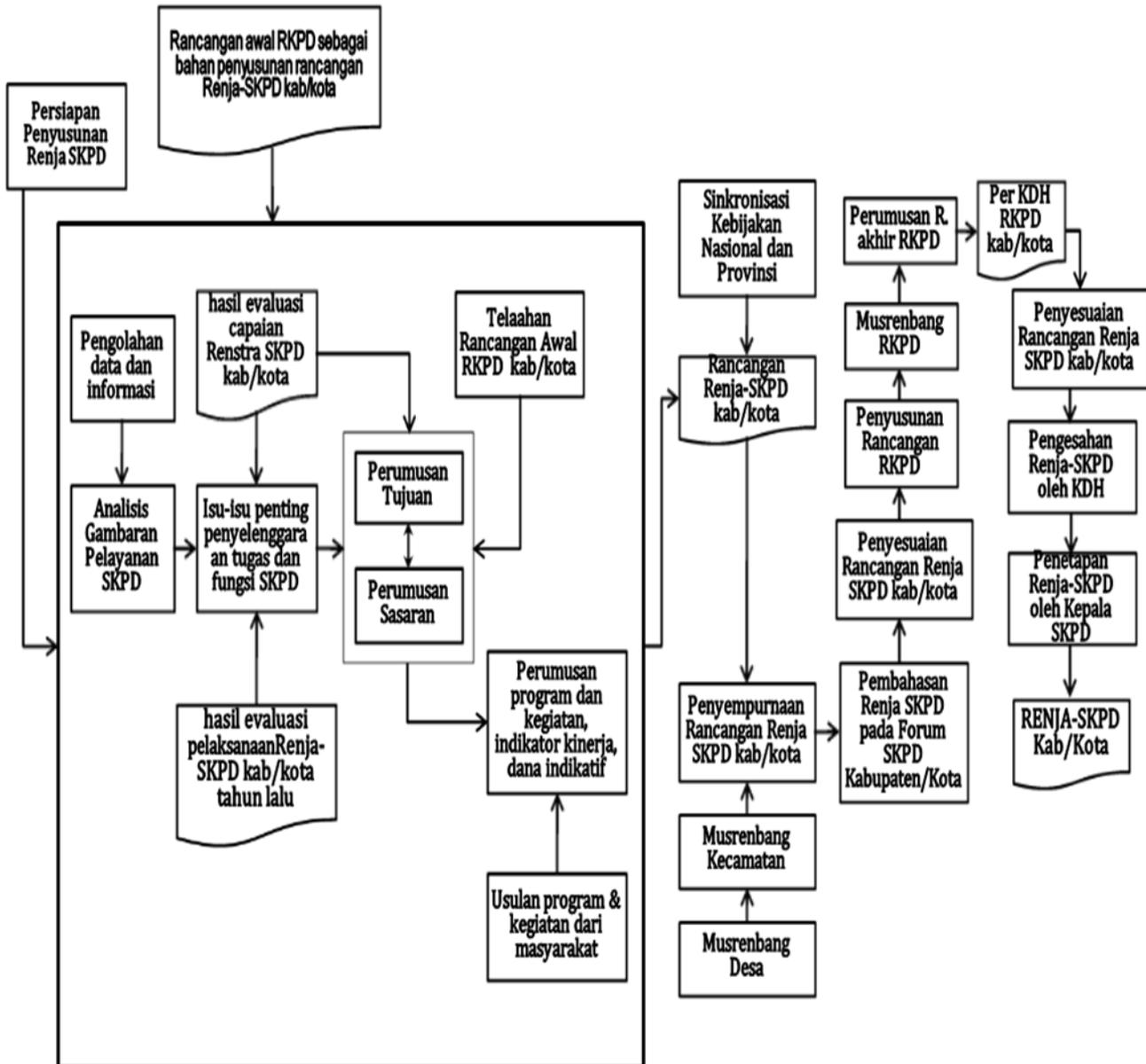
Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru sebagai Sub Sistem dari penyelenggaraan Pemerintah dituntut mampu menjabarkan visi tersebut yang mana setiap tahun diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 ini sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 yang akan datang.

Bagan alir tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat dari bagan berikut ini.

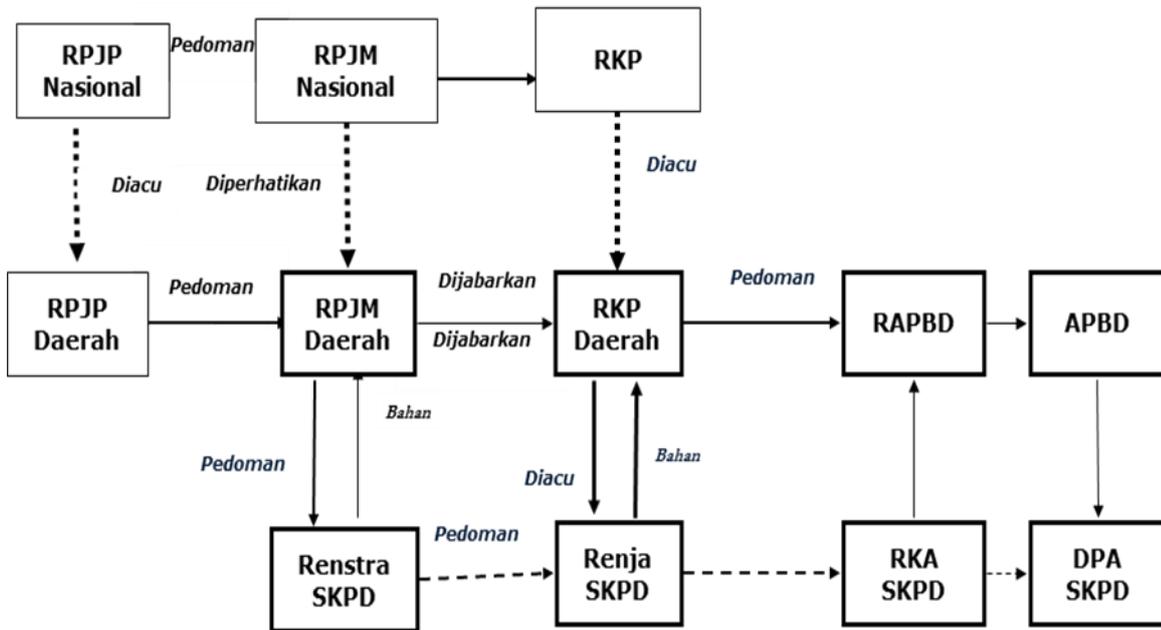
Gambar 1.1

Bagan alir tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Keterkaitan Renja dengan dokumen lainnya dapat dilihat dari bagan berikut ini :

Gambar 1.2
keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan
dokumen perencanaan lainnya (RKPD, Renstra Perangkat Daerah)
serta tindak lanjut penyusunan APBD





1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 merupakan rencana kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858).

Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112).

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).

Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);



2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2022 Nomor 20);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 nomor 11).

Peraturan Bupati

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40);
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 20);
3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;



4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 186);
5. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 52);
6. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 71):
7. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 37).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2025.

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 Tahun ke-4.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program / kegiatan tahunan yang merupakan pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan.



1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.



1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya serta mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan penulisan Renja PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rumusan Program dan Kegiatan

Pada bagian ini memuat hal-hal yang dianggap penting serta rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan Renja BKPSDM.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Pada tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru mengelola 3 Program, 13 Kegiatan, dan 52 Sub Kegiatan yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pemulangan Pegawai yang pensiun
- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan LogistiiK Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguna Lainnya

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



2) Program Kepegawaian Daerah

2.1 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
- b. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- c. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- d. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- f. Pengelolaan Data Kepegawaian

2.2 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Mutasi ASN
- b. Pengelolaan Promosi ASN
- c. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

2.3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- b. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

2.4 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- b. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
- c. Pembinaan Disiplin
- d. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin



3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum

3.2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional
- b. Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Terdapat 28 Sub Kegiatan tidak mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1. *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.428.500 dengan realisasi keuangan Rp. - dengan capaian keuangan sebesar -% dan target kinerja 3 dokumen dengan realisasi kinerja 1 dokumen serta capaian kinerja 33,33%.

2. *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.158.600 dengan realisasi keuangan Rp. - dengan capaian keuangan sebesar -% dan target kinerja 3 dokumen dengan realisasi kinerja 1 dokumen serta capaian kinerja 33,33%.

3. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 74.279.300 dengan realisasi keuangan Rp. 9.231.200 dengan capaian keuangan sebesar 12,43% dan target kinerja 32 laporan dengan realisasi kinerja 14 laporan serta capaian kinerja 43,12%.

4. *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 30.307.200 dengan realisasi keuangan Rp. 5.778.250 dengan capaian keuangan sebesar 19,07% dan target kinerja 7 laporan dengan realisasi kinerja 3 laporan serta capaian kinerja 42,86%.

5. *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.446.390.100 dengan realisasi keuangan Rp. 5.990.493.000 dengan capaian keuangan sebesar 38,78% dan target kinerja 12 dokumen dengan realisasi kinerja 5 dokumen serta capaian kinerja 41,67%.

6. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.875.400 dengan realisasi keuangan Rp. - dengan capaian keuangan sebesar - % dan target kinerja 2 laporan dengan realisasi kinerja - Laporan serta capaian kinerja -%.

7. *Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.726.300 dengan realisasi keuangan Rp. - dengan dan target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja dokumen serta capaian kinerja -%.



8. *Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*
Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 156.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. - dengan capaian keuangan sebesar -% dan target kinerja 4 paket dengan realisasi kinerja - paket serta capaian kinerja -%.
9. *Pemulangan Pegawai yang Pensiun*
Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 101.694.500 dengan realisasi keuangan Rp. 680.000 dengan capaian keuangan sebesar 0,67% dan target kinerja 7 Orang dengan realisasi kinerja 1 orang serta capaian kinerja 14,67%.
10. *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 555.267.000 dengan realisasi keuangan Rp. 102.484.000 dengan capaian keuangan sebesar 18,46% dan target kinerja 13.813 paket dengan realisasi kinerja 6.592 paket serta capaian kinerja 47,72%.
11. *Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD*
Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 485.623.000 dengan realisasi keuangan Rp. 167.284.792 dengan capaian keuangan sebesar 34,45% dan target kinerja 1185 laporan dengan realisasi kinerja 198 laporan serta capaian kinerja 16,71%.
12. *Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD*
Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 25.149.500 dengan realisasi keuangan Rp. 980.000 dengan capaian keuangan sebesar 3,90% dan target kinerja 1185 laporan dengan realisasi kinerja 198 laporan serta capaian kinerja -%.
13. *Pengadaan Mebel*
Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.315.000 dengan realisasi keuangan Rp. - dan target kinerja 37 unit dengan realisasi kinerja Unit serta capaian kinerja -%.



14. *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 463.051.000 dengan realisasi keuangan Rp. - dengan capaian keuangan sebesar -% dan target kinerja 34 unit dengan realisasi kinerja – unit serta capaian kinerja -%.

15. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 99.705.000 dengan realisasi keuangan Rp. - dengan capaian keuangan sebesar -% dan target kinerja 8 unit dengan realisasi kinerja – unit serta capaian kinerja -%.

16. *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.530.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.439.500 dengan capaian keuangan sebesar 19,12% dan target kinerja 2.500 laporan dengan realisasi kinerja 140 laporan serta capaian kinerja 5,60%.

17. *Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 46.640.000 dengan realisasi keuangan Rp. 17.440.330 dengan capaian keuangan sebesar 37,39% dan target kinerja 48 laporan dengan realisasi kinerja 19 laporan serta capaian kinerja 39,58%.

18. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lainnya*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 149.841.500 dengan realisasi keuangan Rp. 32.512.500 dengan capaian keuangan sebesar 21,70% dan target kinerja 31 unit dengan realisasi kinerja 13 unit serta capaian kinerja 41,94%.

19. *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. - dan target kinerja 16 unit dengan realisasi kinerja Unit serta capaian kinerja -%.



20. *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 27.450.000 dengan realisasi keuangan Rp. 2.130.000 dengan capaian keuangan sebesar 7,76% dan target kinerja 45 unit dengan realisasi kinerja 16 unit serta capaian kinerja 35,56%.

21. *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 73.200.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.130.000 dengan capaian keuangan sebesar 1,71% dan target kinerja 33 unit dengan realisasi kinerja 12 unit serta capaian kinerja 36,36%.

22. *Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 550.999.100 dengan realisasi keuangan Rp. 120.297.332 dengan capaian keuangan sebesar 21,83% dan target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 0,40 dokumen serta capaian kinerja 40%.

23. *Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.199.995.850 dengan realisasi keuangan Rp. 70.519.715 dengan capaian keuangan sebesar 3,21% dan target kinerja 20 orang dengan realisasi kinerja 8 orang serta capaian kinerja 40%.

24. *Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 52.536.200 dengan realisasi keuangan Rp. 1.195.000 dengan capaian keuangan sebesar 2,27% dan target kinerja 63 orang dengan realisasi kinerja - orang serta capaian kinerja -%.

25. *Pembinaan Disiplin ASN*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 106.252.700 dengan realisasi keuangan Rp. 24.761.000 dengan capaian keuangan sebesar 23,30% dan target kinerja 1.100 orang dengan realisasi kinerja 300 orang serta capaian kinerja 27,27%.



26. *Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi Sumber Belajar Kerjasama pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 807.991.500 dengan realisasi keuangan Rp. 5.190.000 dengan capaian keuangan sebesar 0,64% dan target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja - dokumen serta capaian kinerja -%.

27. *Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.897.037.750 dengan realisasi keuangan Rp. 1.037.612.720 dengan capaian keuangan sebesar 13,14% dan target kinerja 7 laporan dengan realisasi kinerja 2 laporan serta capaian kinerja 28,57%.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Terdapat 25 Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1. *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 47.806.850 dengan realisasi keuangan Rp. 11.160.650 dengan capaian keuangan sebesar 23,35% dan target kinerja 10 dokumen dengan realisasi kinerja 5 dokumen serta capaian kinerja 50%.

- 2) *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.512.950 dengan realisasi keuangan Rp. 2.987.950 dengan capaian keuangan sebesar 66,21% dan target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 0,50 dokumen serta capaian kinerja 50%.



3) *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.390.700 dengan realisasi keuangan Rp. 2.865.700 dengan capaian keuangan sebesar 65,27% dan target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 1 dokumen serta capaian kinerja 100%.

4) *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.299.029.255 dengan realisasi keuangan Rp. 3.584.766.098 dengan capaian keuangan sebesar 31,73% dan target kinerja 26 Bulan dengan realisasi kinerja 13 Bulan serta capaian kinerja 50%.

5) *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 673.139.500 dengan realisasi keuangan Rp. 259.378.000 dengan capaian keuangan sebesar 38,53% dan target kinerja 12 Dokumen dengan realisasi kinerja 6 Dokumen serta capaian kinerja 50%.

6) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 14.078.400 dengan realisasi keuangan Rp. 7.618.300 dengan capaian keuangan sebesar 54,11% dan target kinerja 16 Laporan dengan realisasi kinerja 8 Laporan serta capaian kinerja 50%.

7) *Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 79.999.650 dengan realisasi keuangan Rp. 46.064.650 dengan capaian keuangan sebesar 57,58% dan target kinerja 300 orang dengan realisasi kinerja 300 orang serta capaian kinerja 100%.

8) *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.546.000 dengan realisasi keuangan Rp. 8.699.000 dengan capaian keuangan sebesar 55,96% dan target kinerja 6 Paket dengan realisasi kinerja 3 Paket serta capaian kinerja 50%.

9) *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 56.701.500 dengan realisasi keuangan Rp. 22.859.000 dengan capaian keuangan sebesar 40,31% dan target kinerja 12 paket dengan realisasi kinerja 6 paket serta capaian kinerja 50%.

10) *Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 54.369.700 dengan realisasi keuangan Rp. 7.819.750 dengan capaian keuangan sebesar 14,38% dan target kinerja 6 paket dengan realisasi kinerja 4 paket serta capaian kinerja 66,67%.

11) *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.110.000 dengan realisasi keuangan Rp. 2.200.000 dengan capaian keuangan sebesar 30,94% dan target kinerja 12 Dokumen dengan realisasi kinerja 6 Dokumen serta capaian kinerja 50%.

12) *Fasilitas Kunjungan Tamu*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 35.994.000 dengan realisasi keuangan Rp. 8.876.000 dengan capaian keuangan sebesar 24,66% dan target kinerja 12 Laporan dengan realisasi kinerja 6 Laporan serta capaian kinerja 50%.

13) *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 355.755.000 dengan realisasi keuangan Rp. 159.600.000 dengan capaian keuangan sebesar 44,86% dan target kinerja 96 laporan dengan realisasi kinerja 74 Laporan serta capaian kinerja 77,08%.

14) *Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 49.895.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.830.000 dengan capaian keuangan sebesar 3,67% dan target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 0.50 dokumen serta capaian kinerja 50%.



15) *Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 59.991.000 dengan realisasi keuangan Rp. 50.015.655 dengan capaian keuangan sebesar 83,37% dan target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 0.70 dokumen serta capaian kinerja 70%.

16) *Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 237.897.750 dengan realisasi keuangan Rp. 50.061.778 dengan capaian keuangan sebesar 21,04% dan target kinerja 100 dokumen dengan realisasi kinerja 85 dokumen serta capaian kinerja 85%.

17) *Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 485.991.920 dengan realisasi keuangan Rp. 115.847.423 dengan capaian keuangan sebesar 23,84% dan target kinerja 12 dokumen dengan realisasi kinerja 6 dokumen serta capaian kinerja 50%.

18) *Pengelolaan Data Kepegawaian*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 53.409.650 dengan realisasi keuangan Rp. 16.216.000 dengan capaian keuangan sebesar 30,36% dan target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 0.50 dokumen serta capaian kinerja 50%.

19) *Pengelolaan Mutasi ASN*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 50.297.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.300.000 dengan capaian keuangan sebesar 2,58% dan target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 0.50 dokumen serta capaian kinerja 50%.

20) *Pengelolaan Pangkat ASN*

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 451.578.500 dengan realisasi keuangan Rp. 131.629.500 dengan capaian keuangan sebesar 29,15% dan target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 0.50 dokumen serta capaian kinerja 50%.



21) Pengelolaan Promosi ASN

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 523.339.500 dengan realisasi keuangan Rp. 17.572.000 dengan capaian keuangan sebesar 3,36% dan target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 0.50 dokumen serta capaian kinerja 50%.

22) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 119.780.950 dengan realisasi keuangan Rp. 18.617.292 dengan capaian keuangan sebesar 15,54% dan target kinerja 1.000 Orang dengan realisasi kinerja 1.000 Orang serta capaian kinerja 100%.

23) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 803.411.814 dengan realisasi keuangan Rp. 23.347.000 dengan capaian keuangan sebesar 2,91% dan target kinerja 9 dokumen dengan realisasi kinerja 6 dokumen serta capaian kinerja 66,67%.

24) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 74.019.000 dengan realisasi keuangan Rp. 19.045.000 dengan capaian keuangan sebesar 25,73% dan target kinerja 10 laporan dengan realisasi kinerja 6 laporan serta capaian kinerja 60%.

25) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 198.500.000 dengan realisasi keuangan Rp. 23.508.480 dengan capaian keuangan sebesar 11,84% dengan target kinerja 80 orang dengan realisasi kinerja 62 orang serta capaian kinerja 77,50%



3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tidak terdapat Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;

1. Kegiatan Assesment menyesuaikan jadwal dengan Puspenkom Pusat Jakarta.
2. Monitoring tugas belajar dan ijin belajar luar daerah belum maksimal.
3. Pelaksanaan Pengadaan ASN masih pada pengusulan formasi.
4. Pelaksanaan Pengumpulan data bezeting dan proyeksi kebutuhan 5 tahun belum terlaksana.
5. Adanya Larangan Mutasi pada Masa PILKADA
6. Biaya pelaksanaan diklat latsar CPNS penjurangan dan orientasi PPPK dengan lembaga penyelenggaraan BPSDMD Provinsi Kalimantan selatan terbentur oleh peraturan yang berlaku saat ini harus pola fasilitasi sedangkan di DPA pola kontribusi.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra;

Terdapat program kegiatan yang melebihi target dari capaian program renstra yang perlu disesuaikan dalam capaian renstra.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- 1) Dilakukannya evaluasi secara berkala terkait serapan target fisik dan target keuangan setiap kegiatan.
- 2) Direncanakan penjadwalkan ulang pada bulan Agustus untuk Pelaksanaan Assesment di ruang CAT BKPSDM.



- 3) Melaksanakan monitoring tugas belajar.
- 4) Melaksanakan pengadaan ASN sesuai timeline yang ditetapkan BKN dan Kemenpan RB.
- 5) Akan segera melaksanakan pengumpulan data bazetting pada SKPD, Kecamatan dan Sekolah
- 6) Melakukan Izin Mutasi Ke Kemendagri
- 7) Berkoordinasi dengan lembaga penyelenggara BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan salah satunya PPSDM Reg Bukit Tinggi yang bisa mengakomodir Latsar CPNS.
- 8) Dilakukannya koordinasi dan konsolidasi dengan pihak penyelenggara diklat dan pengembangan kompetensi lainnya secara intensif agar diperoleh penjadwalan pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur daerah.
- 9) Sebagai lembaga teknis pengelola kepegawaian agar meningkatkan konsultasi dengan pejabat pembina kepegawaian daerah untuk percepatan penyelesaian dokumen kepegawaian sesuai SOP yang telah ditentukan.
- 10) Mengoptimalkan penggunaan media Teknologi Informasi untuk koordinasi dan pengembangan kompetensi pegawai.

Evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah dan capaian Renstra dapat dilihat pada lampiran tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.



TABEL 2.2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN							REALISASI CAPAIAN						PROYEKSI	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14		17
1	Jumlah layanan penerbitan surat pengantar kartu taspen			5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		perubahan prosedur layanan taspen langsung berurusan ke taspen
2	Jumlah layanan penerbitan surat pengantar kartu Pegawai			66	66	66	66	30	30	30	84	43	24	32	1	-		
3	Jumlah layanan pengajuan usul piagam penghargaan SLKS 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun			287	287	287	287	300	300	300	208	309	269	20	238	-		
4	Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar kartu suami (karsu) dan kartu isteri (karis)			123	123	123	123	90	90	90	126	152	138	143	72	22		
5	Melaksanakan Diklat Manajemen Usaha bagi PNS yang purna tugas (Diklat Purna Tugas)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Jumlah Layanan pengajuan izin cuti																	
	a. Izin cuti tahunan			63	63	63	63	600	600	600	297	441	500	870	1193	337		
	b. Izin cuti besar			1	1	1	1	30	30	30	66	66	13	42	62	14		
	c. Izin cuti sakit			4	5	4	4	100	100	100	43	25	42	162	204	134		
	d. Izin cuti bersalin			30	30	30	30	50	50	50	9	50	43	70	50	20		
	e. Izin cuti karena alasan penting			62	62	62	62	80	80	80	41	41	65	120	106	33		
	f. Izin cuti diluar tanggungan negara				-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-		
7	Jumlah Layanan Pengajuan izin PNS untuk melakukan proses perkawinan			3	3	3	3	-	-	-	16	-	-	-	-	-		Perubahan prosedur layanan langsung ke SKPD Masing-masing
8	Jumlah Layanan pengajuan izin PNS untuk melakukan proses perceraian			4	4	4	4	10	10	10	19	14	18	12	9	5		
9	Jumlah Layanan pengajuan izin PNS untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa			3	3	3	3	-	-	-	3	1	-	-	-	-		
10	Jumlah Layanan pengajuan izin PNS untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa			1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN							REALISASI CAPAIAN						PROYEKSI Tahun 2025	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
11	Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar pensiun PNS																	
	a. Pensiun BUP			36	36	36	36	143	152	158	115	159	157	130	119	66		tidak terprediksi
	b. Pensiun atas permintaan sendiri			12	12	12	12	-	-	-	9	9	10	18	5	3		tidak terprediksi
	c. Pensiun Janda/ Duda/ Yatim			5	5	5	5	-	-	-	30	30	45	27	10	14		tidak terprediksi
	d. Pensiun dipercepat sakit/ keuzuran			1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	2	1	1		tidak terprediksi
	e. Pensiun Anumerta/ tewas dalam tugas			1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1		tidak terprediksi
12	Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar pengajuan cetak ke-2 dan perbaikan konversi NIP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar kartu pegawai elektronik (KPE)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Jumlah Layanan kenaikan pangkat PNS			803	803	803	803	803	-	-	848	493	910	591	742	548		
15	Jumlah Layanan penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala			1760	1760	1760	1760	1760	-	-	1824	2128	2435	1705	2029	1044		
16	Jumlah layanan usul pencantuman gelar PNS			30	30	30	30	30	-	-	29	27	24	37	60	49		
17	Jumlah Layanan usul ujian dinas tingkat I dan tingkat II			20	20	20	20	20	-	-	-	37	80	-	-	50		
18	Jumlah Layanan usul peninjauan masa kerja (PMK)			20	20	20	20	20	-	-	8	9	27	22	68	6		
19	Jumlah layanan pemindahan/mutasi PNS atas permohonan																	
	a. Pindah Tugas PNS Mutasi internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru			15	15	15	1200	220	220	220	133	63	117	1324	1187	1069		tidak terprediksi
	b. Pindah Tugas PNS mutasi keluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru			8	8	8	10	10	10	10	26	20	13	20	11	8		tidak terprediksi
	c. Pindah tugas PNS mutasi dari luar lingkungan Pemerintah kabupaten Kotabaru			1	1	1	10	10	10	10	4	4	2	13	2	6		tidak terprediksi
20	Jumlah Layanan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Tertentu																	
	a. Pengangkatan JF melalui perpindahan JF yang serumpun maupun beda rumpun			1	1	1	1	1	1	1	-	-	3	-	4	2		
	b. Pengangkatan kembali karena dalam waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan			1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
	c. Pengangkatan kembali karena ditugaskan secara penuh diluar JF (ybs diangkat dalam jabatan struktural eselon)			2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	1	-		



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN							REALISASI CAPAIAN						PROYEKSI Tahun 2025	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
	d. Pembebasan Sementara karena ditugaskan secara penuh diluar JF (ybs diangkat dalam jabatan struktural eselon)			1	1	1	1	3	3	3	-	-	-	-	1	-		
	e. Tunjangan Jabatan Fungsional karena perubahan Peraturan Presiden			35	35	35	35	35	35	35	24	4	18	21	8	8		
	f. Pengangkatan kembali karena ditugaskan secara penuh diluar JF/mutasi keluar daerah				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
	g. Pembebasan sementara karena mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan			5	5	2	5	7	7	7	1	2	-	1	-	-		
	h. Pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit selama 5 (lima) tahun			1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	i. Pemberhentian dari JF karena alasan kesehatan				-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-		
	j. Pemberhentian dari JF karena dalam waktu 6 (enam) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit			4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-		
	k. Pengangkatan dalam JF jenjang utama			1	1	1	1	4	4	4	-	-	-	-	-	-		
	l. Pengangkatan dalam JF melalui inpassing			1	1	1	1	3	3	3	2	-	6	-	-	-		
	m. Pengangkatan JF melalui perpindahan dari JFU menjadi JFT			1	1	1	1	5	5	5	-	-	-	5	1	-		
	n. Pengangkatan kembali karena selesai mengikuti tugas belajar			5	5	5	5	7	7	7	6	5	3	6	10	2		
	o. Pengangkatan pertama kali dalam JF melalui formasi CPNS			15	15	15	15	160	160	160	100	6	189	159	29	-		
	p. Penyesuaian JF tingkat Terampil menjadi JF tingkat ahli			20	20	20	20	7	7	7	5	6	2	4	8	-		
	q. Penyesuaian kenaikan Jabatan Fungsional			100	100	100	100	120	120	120	187	101	171	117	211	26		
	r. Pembebasan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar JF (ybs diangkat dalam jabatan pelaksana)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
21	Jumlah layanan penempatan PNS setelah tugas belajar			1	1	1	10	10	10	10	11	6	-	10	12	2		tidak terprediksi
22	Jumlah layanan Penunjukan PNS tugas belajar			10	10	10	10	10	10	10	18	6	62	1	-	3		
23	Jumlah layanan usul perbaikan SK			10	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-		
24	Jumlah layanan PNS izin belajar			30	30	30	30	30	30	30	20	5	7	22	-	81		
25	Jumlah layanan usul pengangkatan CPNS menjadi PNS			80	80	80	80	80	80	80	-	232	-	-	-	-		
26	Jumlah layanan penawaran diklat ke SKPD dan penerbitan surat perintah mengikuti diklat			5	7	7	7	5	5	5	2	2	2	40	-	12		
27	Jumlah layanan penerbitan surat panggilan diklat Prajabatan Golongan I,II,III			75	75	75	75	100	100	100	44	188	133	3	-	1		
28	Jumlah layanan penerbitan surat panggilan diklat Kepemimpinan tingkat II,III,IV			16	16	16	16	7	7	7	13	11	24	4	-	-		



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Cakupan data masing-masing bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada lampiran tabel 2.2.2



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TABEL DATA 2.2.2.1
CAKUPAN DATA BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI

NO	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	HUKUMAN DISIPLIN RINGAN					
	- TEGURAN LISAN	-	-	-	-	-
	- TEGURAN TERTULIS	10	3	-	-	-
	- PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS	-	-	-	-	-
2	HUKUMAN DISIPLIN SEDANG					
	- PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN	-	-	-	-	-
	- PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN	-	-	-	-	-
	- PENURUNAN PANGKAT PADA PANGKAT YANG SETINGKAT LEBIH RENDAH UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN	-	-	-	-	-
3	HUKUMAN DISIPLIN BERAT					
	- PENURUNAN PANGKAT PADA PANGKAT YANG SETINGKAT LEBIH RENDAH UNTUK PALING LAMA 3 TAHUN	1	-	-	-	-
	- PEMBEBASAN JABATAN	-	-	-	-	-
	- PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENUNDAAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH	-	-	-	-	-
	- PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT UNTUK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS	-	-	-	-	-
	- PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PNS	-	-	-	1	-
	JENIS HUKUMAN DISIPLIN BERDASARKAN PP 94 TAHUN 2021					
	- PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 BULAN	-	-	-	-	-
	- PEMBEBASAN DARI JABATANNYA MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 BULAN	-	-	-	-	-
	- PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS	-	-	-	-	-
	JENIS HUKUMAN BERDASARKAN PP 11 TAHUN 2017					
	- PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PNS YANG DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA	-	2	-	-	-
	- PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	-	1	-	-	-
	- PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN	-	-	2	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TABEL DATA 2.2.2.1.1
CAKUPAN DATA BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	KARTU PEGAWAI	84	43	24	138	1	-
2	KARTU SUAMI	61	78	59	78	28	9
3	KARTU ISTERI	84	74	79	65	44	13
4	KARTU TASPEN	-	-	-	-	-	-
5	CUTI :						
	- CUTI TAHUNAN	297	441	500	870	1193	614
	- CUTI BESAR	66	66	13	42	62	46
	- CUTI SAKIT	43	25	42	162	204	190
	- CUTI BERSALIN	9	50	43	70	50	26
	- CUTI ALASAN PENTING	41	41	65	120	106	66
	- CUTI PERNIKAHAN	-	-	-	-	-	-
6	SK SUMPAAH DAN JANJI PNS	-	-	-	140	-	-

TABEL DATA 2.2.2.1.2
CAKUPAN DATA BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SATYA LANCANA KARYA SATYA						
	- 10 TAHUN	208	211	197	10	164	-
	- 20 TAHUN	86	40	32	4	37	-
	- 30 TAHUN	67	49	40	6	37	-
2	SK IJIN PERNIKAHAN	26	9	-	-	-	-
3	SK IJIN PERCERAIAN	19	14	18	12	6	5



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TABEL 2.2.2.1.3
DATA BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI
DATA PNSD KABUPATEN KOTABARU BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2020 - 2024

NO	TINGKAT	TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	D-1	5	5	4	4	4	3	2	3	2	2
2	D-2	202	133	164	102	138	85	104	78	102	78
3	D-3	144	389	131	394	127	386	126	381	124	379
4	D-4	37	45	39	56	37	56	35	57	36	58
5	S-1	980	1058	1058	1168	1016	1155	1073	1268	1080	1271
6	S-2	188	77	184	84	181	94	184	102	189	107
7	S-3	4	-	2	-	2	1	2	-	2	-
8	SD	46	2	36	1	33	1	26	2	26	1
8	SLTP	64	9	53	5	46	3	422	194	39	1
8	SLTA	630	319	510	249	463	230	41	1	396	182
JUMLAH		2300	2037	2181	2063	2047	2014	2015	2086	1996	2079
		4337		4244		4061		4101		4075	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TABEL 2.2.2.3.2

DATA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

DATA PNS KABUPATEN KOTABARU BERDASARKAN BATAS USIA PENSIUN

TAHUN 2023 - 2027

NO	GOLONGAN	TAHUN									
		2023		2024		2025		2026		2027	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	GOLONGAN I	2	-	3	-	3	-	1	-	1	-
2	GOLONGAN II	9	2	15	7	12	3	20	1	24	1
3	GOLONGAN III	32	20	24	20	29	25	36	24	55	33
4	GOLONGAN IV	49	25	64	21	32	44	52	24	45	20
JUMLAH		92	47	106	48	76	72	109	49	125	54
		139		154		148		158		179	

TABEL 2.2.2.3.3

DATA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

DATA PNS KABUPATEN KOTABARU YANG MENERIMA SK PENSIUN

TAHUN 2020 - 2024

NO	KETERANGAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENSIUN BUP	159	157	130	119	66
2	PENSIUN JANDA	25	37	18	22	10
3	PENSIUN DUDA	5	8	9	5	4
4	PENSIUN DINI	9	10	18	5	3
5	PENSIUN KEJUJURAN	-	0	2	1	1
6	PENSIUN ANUMERTA	-	1	-	-	1
JUMLAH		198	213	177	152	85

TABEL 2.2.2.3.4

DATA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

TAHUN 2020 - 2024

NO	JENIS DATA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	DATA MUTASI:					
	Ke Luar Pemkab Kotabaru					
1	- KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI	-	-	-	-	1
2	- KE PROVINSI	4	3	8	-	1
3	- KAB/ KOTA	8	5	5	7	5
4	- LUAR PROVINSI	8	5	7	4	1
	Ke Lingkungan Pemkab Kotabaru					
5	- Provinsi/ Kab Kota	4	1	11		
6	- PEGAWAI PUSAT MENJADI PNSD	-	1	2	2	6
7	Mutasi Internal	63	117	128	1187	1069
JUMLAH		87	132	161	1200	1083



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TABEL 2.2.2.3.5

DATA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

DATA PNS KABUPATEN KOTABARU BERDASARKAN PETA JABATAN

TAHUN 2022 - 2024

NO	ESELON	TAHUN			TAHUN			TAHUN		
		2022			2023			2024		
		FORMASI	TERISI	KOSONG	FORMASI	TERISI	KOSONG	FORMASI	TERISI	KOSONG
1	II / A	1	1	-	1	1	-	1	1	0
2	II / B	34	29	5	33	28	5	33	31	2
3	III / A	65	46	19	65	48	17	65	48	17
4	III / B	122	100	22	118	97	21	118	90	28
5	IV / A	256	180	76	249	170	79	249	167	82
6	IV / B	70	35	35	70	33	37	69	32	37
	Jumlah	548	391	157	536	377	159	535	369	166



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TABEL 2.2.2.4
DATA UMUM BKPSDM KABUPATEN KOTABARU

1. Data Kepegawaian

a. Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Golongan / Kelas	SD	SLTP	SLTA	D.1	D.2	D.3	S.1	S.2	Jumlah
1	IV	0	0	0	0	0	0	2	1	3
2	III	0	0	1	0	0	1	21	5	28
3	II	0	0	2	0	0	2	0	0	4
4	I	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5	IX	0	0	0	0	0	0	3	0	3
6	NON PNS	0	0	4	0	0	1	2	0	7
Jumlah		1	0	7	0	0	4	28	6	46

b. Berdasarkan Jabatan dan Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Badan	II/b	1	
2	Sekretaris	III/a	1	
3	Kepala Bidang	III/b	3	
4	Kepala Sub Bidang / Bagian	IV/a	1	
5	Jabatan Fungsional Tertentu		6	
6	Jabatan Fungsional PNS		5	
7	Jabatan Fungsional PPPK		3	
8	Pelaksana		19	

c. Diklat - diklat / Bimtek yang telah diikuti oleh SDM di BKPSDM Kab. Kotabaru

No	Diklat Yang Diikuti	Jumlah	Lama Diklat/ Bimtek	Keterangan
1	Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian Angkatan I	1 Orang	13 Hari	Tahun 2018
2	Pelatihan Penyusunan Renja dan Renstra	2 Orang	3 Hari	Tahun 2019
3	Pelatihan Manajemen Kearsipan berbasis IT	1 Orang	3 Hari	Tahun 2019
4	Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian	1 Orang	13 Hari	Tahun 2020
5	Pelatihan Fungsional Assessor SDM Aparatur	1 Orang	30 Hari	Tahun 2021
6	Bimbingan Teknis Perencanaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri 77 tahun 2020 dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang (SIPD) dan Penerapan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Orang	2 Hari	Tahun 2023
7	Bimbingan Teknis Penginputan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk Ta. 2024 pada Aplikasi SIPD RI	15 Orang	2 Hari	Tahun 2023
8	Bimbingan Teknis Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Aplikasi SIPD RI	5 Orang	2 Hari	Tahun 2024
9	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penatausahaan Berbasis (SIPD) Permendagri No.70 Tahun 2019	6 Orang	2 Hari	Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TABEL 2.2.2.5
DATA TENAGA NON PNS (TNP) KABUPATEN KOTABARU

No	SKPD & KECAMATAN	TAHUN					KET
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Sekretariat Daerah	85	90	64	55	52	
2	Inspektorat	6	5	4	3	2	
3	Sekretariat DPRD	30	28	18	18	17	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29	28	27	24	24	
5	Dinas Kesehatan	69	67	40	29	24	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113	108	37	37	36	
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	11	9	8	7	7	
8	Dinas PP, PA, PP dan KB	35	33	30	26	26	
9	Dinas Lingkungan Hidup	101	106	15	13	13	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	63	61	41	37	37	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	12	13	12	11	
12	Dinas Perhubungan	34	31	29	26	24	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	18	17	17	16	16	
14	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	76	74	23	22	21	
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	15	14	12	10	9	
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	35	34	33	33	30	
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	26	25	23	21	19	
18	Dinas Perikanan	34	32	27	23	20	
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	36	33	29	24	27	
20	Satpol PP dan Damkar	54	52	54	52	49	
21	Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan	12	11	9	11	10	
22	Dinas Ketahanan Pangan	14	14	11	0	0	Th 2023 SKPD di gabung ke Dinas Pertanian
23	Dinas Sosial	7	6	5	7	7	
24	Bappeda	21	16	15	12	10	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	SKPD & KECAMATAN	TAHUN					KET
		2020	2021	2022	2023	2024	
25	BPKAD	26	26	23	21	21	
26	Badan Pendapatan Daerah	12	11	11	10	10	
27	BKPSDM	15	15	9	7	7	
28	Badan Kesbangpol	7	7	7	8	8	
29	BPBD	10	10	7	6	6	
30	RSU Pangeran Jaya Sumitra	104	100	80	79	66	
31	Kec. Kelumpang Utara	3	3	5	4	4	
32	Kec. Kelumpang Barat	2	2	3	3	2	
33	Kec. Kelumpang Tengah	2	2	1	1	1	
34	Kec. Kelumpang Hulu	3	3	2	2	2	
35	Kec. Kelumpang Hilir	3	4	3	3	3	
36	Kec. Kelumpang Selatan	1	1	1	1	1	
37	Kec. Sampanahan	1	1	2	1	1	
38	Kec. Sungai Durian	2	2	2	2	2	
39	Kec. Hampang	3	3	4	4	2	
40	Kec. Pamukan Selatan	3	3	4	3	3	
41	Kec. Pamukan Utara	1	0	0	0	0	Tidak ada TNP
42	Kec. Pamukan Barat	1	2	3	3	3	
43	Kec. Pulau Sebuku	3	3	2	2	2	
44	Kec. Pulau sembilan	4	4	4	4	4	
45	Kec. Pulaulaut Utara	8	9	8	7	7	
46	Kec. Pulaulaut Timur	2	2	2	2	2	
47	Kec. Pulaulaut Barat	1	1	1	1	1	
48	Kec. Pulaulaut Selatan	2	2	4	6	6	
49	Kec. Pulaulaut Tengah	2	2	4	4	4	
50	Kec. Pulaulaut Kepulauan	5	5	5	5	5	
51	Kec. Pulaulaut Sigam	8	9	9	9	8	
JUMLAH		1170	1138	790	716	672	



2. Data Perlengkapan dan Aset

a. Jenis dan Jumlah Perlengkapan dan Aset

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	1	0	1	0	-
2	Tanah Bangunan Kantor	1	1	0	0	-
3	Kipas Angin	5	0	0	5	2001
4	Kursi Kerja Biasa	36	12	19	5	2001
5	Lemari Arsip	4	0	4	0	2001
6	Lemari Kayu	19	7	6	6	2001
7	Lemari Rak Kayu	3	3	0	0	2001
8	Meja Kerja	30	3	23	4	2001
9	Mesin Ketik	1	0	1	0	2001
10	Mobil / Mini Bus	1	0	1	0	2001
11	Mobil Mini Bus	1	0	1	0	2001
12	Printer	2	0	0	2	2001
13	Telephon	2	2	0	0	2001
14	AC	4	4	0	0	2002
15	Brankas	1	0	0	1	2002
16	Kursi Tamu	1	1	0	0	2002
17	Mesin Fotocopy	1	0	0	1	2002
18	Sepeda Motor	1	0	0	1	2002
19	Handy Cam	1	0	0	1	2003
20	Sepeda Motor	1	0	0	1	2003
21	Stabilitator	2	2	0	0	2004
22	Antena Parabola	1	0	0	1	2005
23	Komputer	3	0	3	0	2005
24	Komputer PC	3	0	3	0	2005
25	Kursi Kerja Biasa	10	10	0	0	2005
26	Kursi Lipat	10	10	0	0	2005
27	Kursi Tamu	1	1	0	0	2005
28	Lemari Arsip	3	3	0	0	2005
29	Lemari Rak Arsip	3	3	0	0	2005
30	Lemari Rak Kayu	2	2	0	0	2005



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
31	Lemari TV	1	1	0	0	2005
32	Pendingin Ruangan AC	1	1	0	0	2005
33	Printer	3	0	0	3	2005
34	Sepeda Motor	2	2	0	0	2005
35	TV	1	1	0	0	2005
36	Wireles	1	1	0	0	2005
37	Antena Parabola	1	0	0	1	2006
38	Buku Kepustakaan	1	1	0	0	2006
39	Jaringan Telephon	1	0	0	1	2006
40	Komputer Lap Top	1	0	0	1	2006
41	Kursi Eselon	12	12	0	0	2006
42	Kursi Rapat	54	54	0	0	2006
43	LCD Proyektor	2	0	0	2	2006
44	Meja Kerja	3	3	0	0	2006
45	Meja Komputer	2	2	0	0	2006
46	Meja Rapat	1	1	0	0	2006
47	Printer	4	0	4	0	2006
48	Sepeda Motor	1	1	0	0	2006
49	TV	1	1	0	0	2006
50	Brankas	1	0	0	1	2007
51	Buku Peraturan Perundang2an	1	1	0	0	2007
52	Cangkir	1	1	0	0	2007
53	Garpu	1	1	0	0	2007
54	Gorden	1	1	0	0	2007
55	Jam Dinding	1	0	0	1	2007
56	Kalkulator	10	0	0	10	2007
57	Kelengkapan Komputer	1	0	0	1	2007
58	Kipas Baling-baling	10	10	0	0	2007
59	Kompore Gas	1	1	0	0	2007
60	Komputer / Mainframe	1	1	0	0	2007
61	Komputer Lap Top	1	0	0	1	2007
62	Kulkas	1	1	0	0	2007
63	Kursi Makan	30	30	0	0	2007
64	Lemari Berkas	1	1	0	0	2007



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
65	Lemari Makan	1	1	0	0	2007
66	Meja Makan	10	10	0	0	2007
67	Mesin Ketik	2	2	0	0	2007
68	Mesin Kompresor Air	1	1	0	0	2007
69	Monitor Display	5	5	0	0	2007
70	Peralatan Jaringan Komp	1	0	0	1	2007
71	Personal Computer	2	1	0	1	2007
72	Piring	1	1	0	0	2007
73	Sendok	1	1	0	0	2007
74	Software	1	0	0	1	2007
75	Soun Sistem	1	1	0	0	2007
76	Tabung Gas	1	1	0	0	2007
77	Air Conditioner/ AC	2	2	0	0	2008
78	Kelengkapan Komputer	1	0	0	1	2008
79	LCD Proyektor	1	1	0	0	2008
80	Lemari Kayu	1	0	1	0	2008
81	Mesin Ginset/Generator	1	0	0	1	2008
82	Flas Disk	10	4	0	6	2009
83	Note Book/ Lap Top	3	0	0	3	2009
84	Peralatan Jaringan Komp	1	0	0	1	2009
85	Printer	2	0	0	2	2009
86	Air Conditioner/ AC	1	1	0	0	2010
87	Bunga Plastik	1	1	0	0	2010
88	Gelas	1	1	0	0	2010
89	Gorden	1	1	0	0	2010
90	Jam Dinding	1	1	0	0	2010
91	Kamera Digital	1	1	0	0	2010
92	Kipas Angin	1	1	0	0	2010
93	Lemari Kayu	2	2	0	0	2010
94	Mobil Kijang Inova	1	1	0	0	2010
95	Note Book/ Lap Top	3	3	0	0	2010
96	Personal Computer	2	2	0	0	2010
97	Printer	3	3	0	0	2010
98	Sepeda Motor	2	2	0	0	2010



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
99	Bunga Plastik	1	1	0	0	2011
100	Gelas	1	1	0	0	2011
101	Komputer / Mainframe	1	1	0	0	2011
102	Lemari Kaca	1	1	0	0	2011
103	Meja Kerja	4	4	0	0	2011
104	Printer	3	3	0	0	2011
105	Soun Sistem	1	1	0	0	2011
106	UPS	2	2	0	0	2011
107	AC Split	1	1	0	0	2012
108	Gelas Tamu	2	2	0	0	2012
109	Gorden	1	1	0	0	2012
110	Jaringan SAPK	1	1	0	0	2012
111	Karpet	1	1	0	0	2012
112	Lap Top	5	5	0	0	2012
113	Lemari Kayu	3	3	0	0	2012
114	Mouse + Keyboard	1	1	0	0	2012
115	Pagar Parkir	1	1	0	0	2012
116	Printer	3	3	0	0	2012
117	Rak Buku	3	3	0	0	2012
118	Rak Helm	2	2	0	0	2012
119	Rak Sound System	1	1	0	0	2012
120	Rak TV	1	1	0	0	2012
121	Struktur BKD	1	1	0	0	2012
122	Televisi LCD	1	1	0	0	2012
123	Tempat Kue	1	1	0	0	2012
124	Teralis	4	4	0	0	2012
125	UPS	1	1	0	0	2012
126	AC	1	1	0	0	2013
127	Anjungan BKD	1	1	0	0	2013
128	Buku Perpustakaan	1	1	0	0	2013
129	Dispenser	2	2	0	0	2013
130	DUK	1	1	0	0	2013
131	Gorden Vertical	1	1	0	0	2013
132	Komputer Lap Top	6	6	0	0	2013



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
133	Komputer PC	4	4	0	0	2013
134	Kulkas	1	1	0	0	2013
135	Kursi Kerja Biasa	5	5	0	0	2013
136	Kursi Komputer	4	4	0	0	2013
137	Kursi Tamu	1	1	0	0	2013
138	Lemari Aluminium	1	1	0	0	2013
139	Meja Kerja	5	5	0	0	2013
140	Meja Komputer	4	4	0	0	2013
141	Mesin Ketik	1	1	0	0	2013
142	Printer Dot Matrik	1	1	0	0	2013
143	Printer Injek	5	5	0	0	2013
144	Struktur BKD	1	1	0	0	2013
145	UPS	4	4	0	0	2013
146	Vacum Clenner	1	1	0	0	2013
147	AC Split	2	2	0	0	2014
148	Kursi Pejabat Eselon IV	11	11	0	0	2014
149	Gorden	1	1	0	0	2014
150	Meja Pejabat Eselon IV	11	11	0	0	2014
151	Lemari Arsip	1	1	0	0	2014
152	Kursi Kerja Biasa	60	60	0	0	2014
153	Meja Komputer	60	60	0	0	2014
154	Printer	2	2	0	0	2014
155	Printer Monocrome	1	1	0	0	2014
156	Lemari Mushola	1	1	0	0	2014
157	Lemari Loker	1	1	0	0	2014
158	Kursi Lipat	14	14	0	0	2014
159	Kursi Stanles	2	2	0	0	2014
160	LCD TV	1	1	0	0	2014
161	Alat Pendingin AC	7	7	0	0	2014
162	Komputer PC	60	60	0	0	2014
163	TV LCD 42 Inchi	1	1	0	0	2014
164	Printer	4	4	0	0	2014
165	Printer Monocrome	1	1	0	0	2014
166	Printer Besar	1	1	0	0	2014



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
167	UPS	60	60	0	0	2014
168	Faximilie	1	1	0	0	2014
169	Gelas	1	1	0	0	2014
170	Gelas Tamu	5	5	0	0	2014
171	Tempat Kue	1	1	0	0	2014
172	CCTV	1	1	0	0	2014
173	Genset	1	1	0	0	2014
174	AC Split	2	2	0	0	2014
175	AC Split 2 PK	4	4	0	0	2014
176	Buku Perpustakaan	1	1	0	0	2014
177	Sekat Ruang Kantor	1	1	0	0	2015
178	Pintu Utama Kantor	1	1	0	0	2015
179	PC All in one	5	5	0	0	2015
180	PC All in one (Besar)	1	1	0	0	2015
181	UPS	3	3	0	0	2015
182	Scanner	1	1	0	0	2015
183	Batterai Lapotop	5	5	0	0	2015
184	Server	1	1	0	0	2015
185	Lemari Arsip Diklat	3	3	0	0	2015
186	Lemari Arsip Kepangkatan	1	1	0	0	2015
187	Lemari Arsip Umpeg	1	1	0	0	2015
188	Gordyn	1	1	0	0	2015
189	Karpet lantai	1	1	0	0	2015
190	Taplak Meja	1	1	0	0	2015
191	Sound System	1	1	0	0	2015
192	Kursi Tamu	2	2	0	0	2015
193	Lemari Sound System	1	1	0	0	2015
194	Lemari Arsip Pejabat	1	1	0	0	2015
195	Papan Visual	1	1	0	0	2015
196	Papan data Kepegawaian	1	1	0	0	2015
197	Papan Struktur BKD	1	1	0	0	2015
198	Blender	1	1	0	0	2015
199	tangga Aluminium	1	1	0	0	2015
200	Disvenser	2	2	0	0	2015



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
201	TV Plasma	1	1	0	0	2015
202	Buku Perpustakaan	1	1	0	0	2015
203	Genset	1	1	0	0	2015
204	Jaringan LAN	1	1	0	0	2015
205	Mesin Fotocopy dengan kertas double Folio	1	1	0	0	2016
206	Mesin Absensi	1	1	0	0	2016
207	Penghancur Kertas	1	1	0	0	2016
208	Meja Reseptionis	1	1	0	0	2016
209	Kursi Tamu	2	2	0	0	2016
210	Moubiler lainnya/ Tulisan dinding	1	1	0	0	2016
211	Moubiler lainnya/ Rumah Ginset	1	1	0	0	2016
212	Kursi Kerja	6	6	0	0	2016
213	Dinding/ Sekat Plastik	1	1	0	0	2016
214	Karpet	1	1	0	0	2016
215	AC Split1/2 PK	1	1	0	0	2016
216	AC Split 1 PK	1	1	0	0	2016
217	Kipas Angin	1	1	0	0	2016
218	Alat Dapur lain	1	1	0	0	2016
219	Televisi LCD	1	1	0	0	2016
220	Panel	1	1	0	0	2016
221	Sarung Komputer	1	1	0	0	2016
222	Teralis Besi	1	1	0	0	2016
223	P.C Unit Komputer PC	1	1	0	0	2016
224	Printer	5	5	0	0	2016
225	UPS	2	2	0	0	2016
226	Rouner	1	1	0	0	2016
227	HUB	1	1	0	0	2016
228	RJ-45	2	2	0	0	2016
229	Plug-Book	2	2	0	0	2016
230	Crimping Tool	1	1	0	0	2016
231	Tester	1	1	0	0	2016
232	Klem Kabel	20	20	0	0	2016
233	Radio Acces Point	4	4	0	0	2016
234	Wireles LAN	1	1	0	0	2016



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
235	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0	0	2016
236	Meja Kerja	6	6	0	0	2016
237	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	8	0	0	2016
238	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	7	7	0	0	2016
239	Buku Agama Islam	3	3	0	0	2016
240	Buku Ekonomi	3	3	0	0	2016
241	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2	2	0	0	2016
242	Mesin Absensi	58	58	0	0	2017
243	Mesin Absensi	44	44	0	0	2018
244	Printer	7	7	0	0	2018
245	UPS	3	3	0	0	2018
246	Mouse	1	1	0	0	2018
247	Lap Top	3	3	0	0	2018
248	Note Book	1	1	0	0	2018
249	Hard Disk Internal	1	1	0	0	2018
250	Komputer PC	2	2	0	0	2018
251	Monitor Komputer	1	1	0	0	2018
252	Kursi Esselon III	2	2	0	0	2018
253	Lemari Kaca	5	5	0	0	2018
254	Meja Kerja	1	1	0	0	2018
255	Kursi Esselon IV	2	2	0	0	2018
256	Keyboard dan mouse	9	9	0	0	2018
257	UPS	23	23	0	0	2018
258	Kabel Power dan Adaptor	6	6	0	0	2018
259	Alat Pemadam	2	2	0	0	2018
260	AC	2	2	0	0	2018
261	Buku Manajemen Kinerja	1	1	0	0	2019
262	Buku Undang Undang ASN Aparatur	1	1	0	0	2019
263	Buku Pengadaan Barang / Jasa	1	1	0	0	2019
264	Buku Belajar Singkat PHP 7	1	1	0	0	2019
265	Buku Komputer Grafik / Design	1	1	0	0	2019
266	Buku Sakti Kuasai Exsel	1	1	0	0	2019
267	Buku Iktisar Bahasa Tubuh	1	1	0	0	2019
268	Mesin Absen dan Perlengkapannya	0	0	0	0	2019



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
269	LAN (Lokal Area Network)	2	2	0	0	2019
270	Personal Komputer Lain-Lain (RJ45Ubility)	1	1	0	0	2019
271	Adapter PC	4	4	0	0	2019
272	Kabel Power Adapter PC	6	6	0	0	2019
273	Keyboard	2	2	0	0	2019
274	UPS	6	6	0	0	2019
275	Mouse	5	5	0	0	2019
276	Server	1	1	0	0	2019
277	Router	1	1	0	0	2019
278	Mesin Absen	8	8	0	0	2020
279	Batteray Mesin Absen	10	10	0	0	2020
280	Adaptor Mesin Absen	10	10	0	0	2020
281	UPS	1	1	0	0	2020
282	Kabel LAN	1	1	0	0	2021
283	RJ-45 Cat6	1	1	0	0	2021
284	RJ-45 Cat5e	2	2	0	0	2021
285	Switch/HUB	2	2	0	0	2021
286	Hard Disk Server	1	1	0	0	2021
287	Layar Monitor	1	1	0	0	2021
288	Ram Server	2	2	0	0	2021
289	Eksternal Portabel Harddisk	1	1	0	0	2021
290	Wireless Access Point	5	5	0	0	2021
291	AC Split 1 PK	4	4	0	0	2021
292	AC Split 2 PK	1	1	0	0	2021
293	Kipas Angin	3	3	0	0	2021
294	Proyektor Viewer	1	1	0	0	2021
295	Mikropon	3	3	0	0	2021
296	Kamera Digital	1	1	0	0	2021
297	Printer	1	1	0	0	2021
298	UPS	10	10	0	0	2021
299	Laptop Server	1	1	0	0	2021
300	Scanner	2	2	0	0	2021
301	Handphone	1	1	0	0	2021
302	Laptop	2	2	0	0	2021



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
303	Printer Desks Jet	1	1	0	0	2021
304	scanner	1	1	0	0	2021
305	Lampu Dekoratif	1	1	0	0	2021
306	AC 1 PK	4	4	0	0	2022
307	AC 2 PK	2	2	0	0	2022
308	Kipas Angin	3	3	0	0	2022
309	Kamera CCTV	5	5	0	0	2022
310	Laptop	20	20	0	0	2022
311	Scanner Pro	2	2	0	0	2022
312	Hardisk External	4	4	0	0	2022
313	Konektor RJ45	9	9	0	0	2022
314	Printer	3	3	0	0	2022
315	Printer	7	7	0	0	2022
316	Meja Komputer	39	39	0	0	2022
317	Kursi Kerja Kantor	1	1	0	0	2022
318	Kursi Kerja Kantor	6	6	0	0	2022
319	Kursi Rapat	23	23	0	0	2022
320	Komputer Server	1	1	0	0	2022
321	Ram Server	1	1	0	0	2022
322	Harddisk Server SDD	2	2	0	0	2022
323	Scanner portable	2	2	0	0	2022
324	Hardisk Server	1	1	0	0	2022
325	Laptop 14"	1	1	0	0	2022
326	Laptop Touchscreen	1	1	0	0	2022
327	Laptop 15"	4	4	0	0	2022
328	Scanner A3	1	1	0	0	2022
329	Mouse Pad	28	28	0	0	2022
330	Laptop 14"	2	2	0	0	2022
331	Peralatan Zoom Meeting	1	1	0	0	2022
332	Smart TV	1	1	0	0	2022
333	Ban Bekas	25	0	0	25	2022
334	Drum	3	0	0	3	2022
335	Karung Goni	10	0	0	10	2022
336	Tali Tubuh	30	0	0	30	2022



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
337	Kursi Kerja	11	11	0	0	2023
338	Kursi Kerja Eselon II	1	1	0	0	2023
339	Kursi Kerja Eselon III	1	1	0	0	2023
340	Kursi Kerja Non Eselon	7	7	0	0	2023
341	Lemari Arsip	2	2	0	0	2023
342	Sound System	1	1	0	0	2023
343	Laptop	17	17	0	0	2023
344	PC All In One	12	12	0	0	2023
345	Printer	4	4	0	0	2023
346	Scanner A3	1	1	0	0	2023
347	Scanner	2	2	0	0	2023
348	External / Portable Hardisk	3	3	0	0	2023
349	Kulkas	2	2	0	0	2023
350	Dispencer	2	2	0	0	2023
351	Vacum Cleaner	1	1	0	0	2023
	Total	1528	1326	67	135	



3. Data- data Terkait Hasil Pekerjaan

a. Kegiatan yang dilaksanakan

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Bagian / Bidang	Keterangan
1	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
2	Rapat Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin (MPPHD)	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
3	Rapat Tim Evaluasi Kinerja PNS	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
4	Pemeriksaan Kesehatan Bagi PNS yang Sakit	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
5	Verifikasi Karis, Karsu, Karpeg dan Taspen	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
6	Verifikasi Satya Lencana Karya Satya	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
7	Sumpah / Janji PNS	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
8	Asistensi Evaluasi Kinerja Pegawai	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
9	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
10	Pengelola Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
11	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
12	Penyelenggaraan Konseling Pegawai	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
13	Mediasi Perceraian Pegawai	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
14	Pelantikan Pejabat Struktural	Mutasi dan Promosi	
15	Rapat Tim Baperjakat dan Sekretariat Baperjakat	Mutasi dan Promosi	
16	Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama	Mutasi dan Promosi	
17	Pengelola Fasilitas PNS Pindah Tugas	Mutasi dan Promosi	
18	Pengangkatan dan Pindahan Pegawai ASN	Mutasi dan Promosi	
19	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Mutasi dan Promosi	
20	Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	Mutasi dan Promosi	
21	Pengelolaan Dokumen Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Pencantuman Gelar dan Peninjauan Masa Kerja (PMK)	Mutasi dan Promosi	
22	Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK	Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	
23	Penempatan PNS dan PPPK	Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	
24	Diklat Prajabatan CPNS dan Orientasi PPPK	Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	
25	Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	
26	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	
27	Pengiriman PNS Tugas Belajar Utusan Pemkab Kotabaru	Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	
28	Pemberian Ijin Belajar	Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	
29	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan	Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	
30	Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI)	Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Bagian / Bidang	Keterangan
31	Pelaksanaan Uji Kompetensi	Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	
32	Pengelolaan Kepegawaian Non PNS	Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	
33	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Satu Pintu	Sekretariat	
34	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretariat	



b. Daftar Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati

No	Judul Perda / Perbup	Nomor Perda/Perbup	Tanggal	Bagian/Bidang
1	Peraturan Bupati Kotabaru tentang Tata Cara , Persyaratan Pemberian Ijin Belajar,dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Surat Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	55 Tahun 2012	01 Mei 2012	Pengembangan Pegawai
2	Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Periode 2012-2015	42 Tahun 2012	03 Februari 2012	Pengembangan Pegawai
3	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II dan Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	59 Tahun 2012	15 Juni 2012	Pengembangan Pegawai
4	Pemberian Tunjangan kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	31 Tahun 2013	17 Juni 2013	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
5	Upah Bulanan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45/770/KUM/2013	31 Desember 2013	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
6	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	31 Tahun 2013	31 Desember 2013	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
7	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional	21 Tahun 2014	19 Maret 2014	Kepangkatan dan Pensiun
8	Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru No 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembeian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	14 Tahun 2015	30 Januari 2015	Pengembangan Pegawai
9	Perubahan atas Peraturan Bupati Tentang Keputusan Bupati Kotabaru tentang Upah Bulanan Tenaga Non PNS Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	30 Tahun 2015	06 Juli 2015	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
10	Upah Bulanan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45.796.KUM Tahun 2015	31 Desember 2015	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
11	Perubahan atas Keputusan Bupati Kotabaru tentang Upah Bulanan Tenaga Non PNS	188.45.187.KUM Tahun 2016	07 Januari 2016	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
12	Peraturan Bupati Kotabaru tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	28 Tahun 2016	24 Oktober 2016	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
13	Peraturan Bupati Kotabaru tentang Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintahan kabupaten Kotabaru	68 Tahun 2016	27 oktober 2016	Pengembangan Pegawai
14	Tata Cara Perolehan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kotabaru	69 Tahun 2016	07 Nopember 2016	Kepangkatan dan Pensiun
15	Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/796/KUM/2015 tentang Upah Bulanan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45/011/KUM/2017	16 Januari 2017	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
16	Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2011 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS Tugas Belajar dan Ijin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	8 Tahun 2017	Januari 2017	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
17	Peraturan Bupati Kotabaru tentang Disiplin Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	27 Tahun 2017	6 Oktober 2017	Kepangkatan dan Pensiun
18	Keputusan Bupati kotabaru Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Angkatan Pertama Utusan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018	188.45/344/KUM/2018	5 Maret 2018	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Judul Perda / Perbup	Nomor Perda/Perbup	Tanggal	Bagian/Bidang
19	Peraturan Bupati tentang pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	17 Tahun 2019	25 Pebruari 2019	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
20	Keputusan Bupati Kotabaru Tentang Pembentukan tim penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Kotabaru	188.45/376/KUM/2019	30 April 2019	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
21	Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Pemindahan dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	60 Tahun 2020	04 Mei 2020	Pengadaan dan Pengembangan Aparatur
22	Peraturan Bupati Kotabaru tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	107 Tahun 2020	09 Juli 2020	Pengadaan dan Pengembangan Aparatur
23	Peraturan Bupati tentang pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	137 Tahun 2020	23 September 2020	Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi
24	Peraturan Bupati tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan Sistem Aplikasi Berbasis Elektronik	162 Tahun 2020	29 Desember 2020	Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi
25	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	01 Tahun 2021	04 Januari 2021	Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi
26	Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	94 Tahun 2022	07 Juni 2022	Mutasi dan Promosi
27	Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 95 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	95 Tahun 2022	07 Juni 2022	Mutasi dan Promosi
28	Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kelompok Rencana Suksesi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	96 Tahun 2022	07 Juni 2022	Mutasi dan Promosi
29	Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/113/KUM/2022 tentang Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45/113/KUM/2022	14 Maret 2022	Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi
30	Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/114/KUM/2022 tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Tipe A pada SKPD/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45/114/KUM/2022	17 Maret 2022	Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi
31	Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/115/KUM/2022 tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Tipe B pada SKPD/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45/115/KUM/2022	17 Maret 2022	Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi
32	Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/116/KUM/2022 tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Tempat Bertugas pada SKPD/PNS Kecamatan dan Pukesmas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45/116/KUM/2022	17 Maret 2022	Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Judul Perda / Perbup	Nomor Perda/Perbup	Tanggal	Bagian/Bidang
33	Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/117/KUM/2022 tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi pada SKPD/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45/117/KUM/2022	17 Maret 2022	Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi
34	Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/118/KUM/2022 tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Tempat Bertugas pada SKPD/PNS Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	188.45/118/KUM/2022	17 Maret 2022	Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi
35	Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/572/KUM/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/118/KUM/2022 tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Tempat Bertugas pada SKPD/PNS Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	188.45/572/KUM/2022	03 Oktober 2022	Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi
36	Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/573/KUM/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/115/KUM/2022 tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Tipe B pada SKPD/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45/573/KUM/2022	03 Oktober 2022	Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi
37	Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/573/KUM/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/117/KUM/2022 tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi pada SKPD/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45/574/KUM/2022	03 Oktober 2022	Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi
38	Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	01 Tahun 2023	06 Februari 2023	Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi
39	Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	01 Tahun 2024	15 Januari 2024	Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi
40	Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	07 Tahun 2024	27 Maret 2024	Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi



2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan *Isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Masih belum optimalnya kinerja ASN dan belum optimalnya pelayanan manajemen kepegawaian.*

Didapat dari Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Manajemen Perangkat Daerah yang menjadi perhatian berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan BKPSDM dilihat dari hasil evaluasi rencana kerja diantaranya :

1. Belum tersusunannya perencanaan kebutuhan diklat berdasarkan analisis kebutuhan organisasi.
2. Belum meratanya kualitas kompetensi sumber daya aparatur yang professional.
3. Terbatasnya kewenangan untuk menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan diklat.
4. Jumlah Sumber daya aparatur masih belum memadai dan belum ideal
5. Masih dibutuhkan ASN Formasi Tenaga Medis dan ASN Formasi Guru dengan Kualifikasi Pendidikan S1 setiap tahunnya
6. Pemenuhan formasi kebutuhan pegawai melalui pengadaan CPNS dan PPPK
7. Peningkatan Kompetensi ASN melalui penyelenggaraan Diklat/bimtek/Workshop dan Pelatihan
8. Masih minimnya bentuk penghargaan kepada ASN yang berprestasi
9. Tuntutan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
10. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan



Pada Program Nasional pada agenda Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru selaras dengan program nasional yaitu Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain:

- Penetapan formasi dan pengadaan ASN dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi;
- Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat;
- Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
- Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.



2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada lampiran tabel 2.4



Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kotabaru

SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	5		6
	BELANJA		BELANJA			48.294.561.815	BELANJA			47.746.186.381
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					32.732.496.815				34.774.054.130
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas			215.646.848
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	10	Dokumen	55.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	47.896.150
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	1	Dokumen	5.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	9.012.748
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun	1	Dokumen	6.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	13.709.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	1	Dokumen	5.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	7.390.700
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun	1	Dokumen	6.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	12.658.300
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun	32	Laporan	75.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32	Laporan	79.822.750



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	5		6
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	7	Laporan	65.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	45.157.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu				Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu			13.419.960.082
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	45	Orang/Bulan	13.036.696.815	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang/Bulan	12.756.753.732
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terbayarkan	12	Dokumen	15.546.100.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	594.530.500
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Kotabaru	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	12	Dokumen	700.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	41.371.000
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Dokumen	10.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Dokumen	6.867.400
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	16	Laporan	45.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	Laporan	18.578.250
13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1	Dokumen	5.000.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.859.200
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu				Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu			639.174.000
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	100	Paket	250.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	183	Paket	202.200.000
15	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pemulangan Pegawai Pensiun terfasilitasi	7	Orang	100.000.000	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	7	Orang	101.694.500
16	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan	300	Orang	80.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	91.724.500



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	5		6
16	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Kotabaru	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Orang	-	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20	Orang	243.555.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.346.201.850
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	6	Paket	22.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	15.546.000
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24	Paket	120.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	107.971.000
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	14000	Paket	350.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13813	Paket	608.773.000
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6	Paket	65.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	58.054.850
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	Dokumen	8.500.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	7.560.000
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan	12	Laporan	36.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	22.980.000
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	110	Laporan	487.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1185	Laporan	525.317.000
24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola	1	Dokumen	25.500.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu			571.354.500
25	Pengadaan Mebel	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengadaan Mebel yang diadakan	5	Unit	60.000.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	123	Unit	407.630.000
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	30	Unit	530.000.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	Unit	78.020.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	5		6
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	9	Unit	60.000.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18	Unit	85.704.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.129.450.000
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	12	Laporan	33.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	37.725.000
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	89	Laporan	146.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	121.040.000
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	124	Laporan	395.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	17.970.685.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara			452.266.850
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6	Unit	150.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	201.616.850
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	160.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	150.000.000
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	39	Unit	25.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	41	Unit	27.450.000
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	28	Unit	68.700.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34	Unit	73.200.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	5		6
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					5.247.065.000				6.473.057.992
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Prosentase ASN sesuai Formasi				Prosentase ASN sesuai Formasi			1.718.079.720
35	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	Dokumen	49.892.000
36	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	60.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	59.985.000
37	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	551.000.000	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	788.048.000
38	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	180	Dokumen	110.000.000	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100	Dokumen	237.897.700
39	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	6	Lembaga	15.000.000	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	6	Lembaga	-
40	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	486.100.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	14	Dokumen	528.847.920
41	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Data Kepegawaian	2	Dokumen	55.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	Dokumen	53.409.100
	Mutasi dan Promosi ASN		Prosentase Layanan Mutasi dan Promosi tepat waktu				Prosentase Layanan Mutasi dan Promosi tepat waktu			1.011.578.400
42	Pengelolaan Mutasi ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Mutasi ASN	50	Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	Dokumen	49.999.950
43	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	Dokumen	250.000.000	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	Dokumen	451.578.500
44	Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Promosi ASN	200	Dokumen	503.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	509.999.950



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	5		6
	Pengembangan Kompetensi ASN		Prosentase Pengembangan Kompetensi ASN (Pendidikan Lanjutan dan Penempatan Jabatan Fungsional)				Prosentase Pengembangan Kompetensi ASN (Pendidikan Lanjutan dan Penempatan Jabatan Fungsional)			2.319.776.450
45	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	35	orang	2.200.000.000	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	20	orang	2.199.995.500
46	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1000	Orang	80.000.000	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	1000	Orang	119.780.950
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Prosentase Kinerja ASN dengan nilai minimal kategori baik				Prosentase Kinerja ASN dengan nilai minimal kategori baik			1.423.623.422
47	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9	Dokumen	604.435.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9	Dokumen	1.109.986.522
48	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	247	Orang	70.000.000	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	63	Orang	-
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kabupaten Kotabaru	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa		Orang	-	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	300	Orang	99.991.000
49	Pembinaan Disiplin ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pembinaan Disiplin ASN	1100	Orang	80.000.000	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	300	Orang	106.252.250
50	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10	Laporan	75.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10	Laporan	107.393.650
51	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1	Dokumen	6.930.000	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1	Dokumen	-



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	5		6
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					10.315.000.000				6.499.074.259
	Pengembangan Kompetensi Teknis		Prosentase Pemenuhan Kompetensi Teknis ASN				Prosentase Pemenuhan Kompetensi Teknis ASN			-
52	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	55	Orang	198.500.000	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	55	Orang	-
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Prosentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial dan				Prosentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial dan fungsional			6.499.074.259
53	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	1	Dokumen	808.000.000	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	1	Dokumen	770.829.500
54	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	6	Laporan	9.308.500.000	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7	Laporan	5.728.244.759

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2025, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk tahun 2025 tidak ada.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Kotabaru

Perangkat Daerah : BKPSDM Kabupaten Kotabaru

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama tahun 2025 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan kebijakan nasional dikaitkan RPJMN 2020-2024 yang disusun oleh Pemerintah. Prioritas nasional berdasarkan ringkasan eksekutif RPJMN 2020 – 2024 antara lain:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus law, terutama menerbitkan 2 Undang-undang pertama Undang-undang Cipta kerja dan kedua Undang-undang Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil Menengah UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan selonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka di terjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat infastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan.

Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Government*), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan. Selain itu struktur kelembagaan yang lincah (*agile*), yang mampu mengidentifikasi masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), perlu membangun SDM aparatur pembelajar, dengan menanamkan konsep pola pikir yang mampu berfikir strategis, terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan serta masyarakat, dengan berdasarkan sistem merit dan talent management.

Dari sisi pelayanan publik, diharapkan akan terbangun pelayanan publik berkualitas, akuntabel, dan responsif yang dapat memberikan perubahan sosial. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan, terbangunnya portal layanan terpadu baik secara elektronik maupun non elektronik, kanal pengaduan layanan yang efektif dan perbaikan layanan berkala bersama stakeholder (masyarakat dan pelaku usaha).

Untuk itu tata kelola pemerintahan sangat memerlukan prasyarat telah terbangunnya proses bisnis yang efektif, tidak silo, terbuka untuk berkolaborasi antar Pemerintah maupun dengan non Pemerintah. Tata kelola juga akan terus diperbaiki dan di evaluasi secara berkala didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Selain terkoneksi antar lembaga ditingkat pusat, keterhubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi penting, karena pelaksanaan dari proses bisnis pada tingkat teknis akan membawa dampak positif baik langsung maupun secara tidak langsung pada pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Isu strategis dari tata kelola pemerintahan yaitu:

- 1) ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral. Terwujudnya ASN yang profesional merupakan salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi.
- 2) Kelembagaan dan proses bisnis yang sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan.
- 3) Pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan dengan penerapan standar pelayanan publik yang menyeluruh. Penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya ditinjau melalui penerapan standar pelayanan di instansi pemerintah.
- 4) Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang beintegritas. Akuntabilitas kinerja instansi ditinjau dari opini BPK atas laporan keuangan instansi dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 5) Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah.



Arah kebijakan dan strategi dari pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui :
 - (a) Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah;
 - (b) Rencana pengembangan kompetensi ASN; dan
 - (c) Penyusunan pola karir instansional.
- 2) Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui:
 - (a) Penerapan proses bisnis instansi;
 - (b) Implementasi arsitektur SPBE instansi; dan
 - (c) Penerapan e-Arsip terintegrasi.
- 3) Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui:
 - (a) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi;
 - (b) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan;
 - (c) Pemenuhan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Instansional.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui:
 - (a) Penerapan (menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan di Unit Pelayanan Publik (UPP) tertentu;
 - (b) Percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan publik;
 - (c) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di UPP tertentu;
 - (d) Pelaksanaan FKP dalam penetapan standar pelayanan publik;
 - (e) Pemutakhiran informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
 - (f) Integrasi penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D.



Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2024 :

1. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata
2. Mewujudkan Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Negara dan sebagai Pendukung food Estate
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan berdaya saing.
4. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah.
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik.

Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 pada poin ke enam yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik. Dengan tujuan dari misi tersebut adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu dari sasaran dari tujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan strategi yang telah disusun antara lain :

- 1) Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintah yang profesional dan pemerintahan yang akuntabel
- 2) Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah
- 3) Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik

Untuk mewujudkan capaian dari misi keenam RPJMD, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan tugasnya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah



Kebijakan daerah tentu mengarah kepada kebijakan nasional dan dalam hal ini Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentunya tidak lepas dari kebijakan daerahnya sendiri yaitu Kabupaten Kotabaru dan kebijakan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai acuannya mengarah kepada Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang mana Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 :

1. Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Penunjang Sektor Perekonomian
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan
5. Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

Untuk Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana prioritas pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2024 ada poin ke 5 yaitu Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu :

Kebijakan :

- a. Evaluasi Kinerja lembaga pemerintah Kabupaten Kotabaru, Analisis lembaga Pemerintahan Kabupaten Kotabaru untuk mengetahui lembaga yang perlu ada dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dengan melakukan penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif serta membentuk lembaga Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di masyarakat Kabupaten Kotabaru dengan berpijak pada prinsip sedikit struktur kaya fungsi.



- b. Penetapan struktur dan proses kewenangan dan tanggung jawab organisasi secara jelas dan tegas.
- c. Penetapan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab organisasi secara jelas, tegas dan fleksibel.
- d. Rekrutmen, penempatan, promosi, dan mutasi sesuai dengan kualifikasi teknis atau hasil analisis jabatan.
- e. Penataan Aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru sesuai dengan prinsip *"the right man of right job"*.
- f. Peningkatan kompetensi Aparatur pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- g. Penetapan kualifikasi Aparatur (bertaqwa, berakhlak, bersih dan kompeten).
- h. Penegakan disiplin kerja, etika dan profesi aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- i. Penempatan Pegawai sesuai dengan Kompetensinya dan Pemerataan Penempatan Aparatur Keseluruh Pedesaan dan Kecamatan.
- j. Sistem pembinaan karir aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang prospektif.
- k. Pemberian *reward* dan *punishment* aparatur pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawabnya.
- l. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mencermati lingkungan internal dan eksternal organisasinya.
- m. Meningkatkan tingkat responsivitas (cepat tanggap dan cepat menanggapi) apa yang menjadi masalah, keluhan dan aspirasi masyarakat serta perubahan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal.
- n. Merubah sikap dan perilaku aparatur pemerintah menjadi pelayan masyarakat.



- o. Melakukan *efisiensi penyelenggaraan pemerintahan* baik efisiensi sumber daya manusia, efisiensi sarana maupun efisiensi dana.
- p. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.
- q. Peningkatan pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan.
- r. Meningkatkan fungsi dan profesionalitas birokrasi daerah sebagai pelayan masyarakat dan pengelola kekayaan daerah.
- s. Melakukan debirokratisasi dalam pelayanan perijinan investasi melalui penyederhanaan sistem dan prosedur melalui pelayanan satu atap/satu pintu.
- t. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Prioritas dan fokus :

- a. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
- b. Evaluasi Kinerja lembaga pemerintah Kabupaten Kotabaru
- c. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif serta berpijak pada prinsip *sedikit struktur kaya fungsi*
- d. Peningkatan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia
- e. Peningkatan Pelayanan Prima
- f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dengan selalu menciptakan sistem dan inovasi baru
- g. Pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengendalian



- h. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan
- i. Peningkatan Pembinaan Sosial Keagamaan
- j. Pemberian Subsidi warga yang meninggal dunia
- k. Pengelolaan Bebas Biaya KTP dan Akte
- l. Optimalisasi pelaksanaan e-KTP
- m. Penerapan Perda SOTK Baru tindak lanjut UU No 23 Tahun 2014
- n. Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah
- o. Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan serta peningkatan peluang pihak investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kotabaru
- p. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS)
- q. Pembangunan kantor UPTD Dinas Pendapatan
- r. Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD
- s. Menekan biaya pemungutan Sumber PAD.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama lima tahun.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Visi RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 -2026 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Kotabaru yang semakin mandiri dan sejahtera melalui peningkatan di bidang agribisnis dan kepariwisataan”***. Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Misi Pembangunan dalam 5 tahun mendatang adalah:

- Misi 1 : Mewujudkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan.
- Misi 2 : Meningkatkan kualitas masyarakat yang religius, lebih sehat cerdas dan kreatif serta terampil.
- Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Pilihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru termasuk dalam Misi ke-3 yaitu Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan Visi dan Misi ke-3 di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu Jangka pendek (satu tahun) dalam rentang waktu masa Renstra.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja ASN
2. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Transparan dan Akuntabel

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan Kompetensi
		Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi
2.	Meningkatnya Disiplin Pegawai ASN	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian



Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2025 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada lampiran tabel 3.2.



TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTABARU

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET INDIKATOR KINERJA PADA TAHUN		SATUAN
						TAHUN 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	8	7	9
1	Meningkatkan Kinerja ASN	Nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Nilai Rata-rata SKP BAIK	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan Kompetensi	85	90	persen
					Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi	35	40	persen
					Meningkatnya Disiplin Pegawai ASN	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	100	100
2	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Transparan dan Akuntabel	Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	90	90	persen



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Pada tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan 3 Program 13 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp. 47.746.186.381,00. Adapun rincian rencana kegiatan per program serta indikator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru yaitu :

Program Rutin SKPD terdiri dari 1 Program, 7 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan SKPD
 - f. Evaluasi Perangkat Daerah



- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

1.2. Administasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya
- b. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1.6 Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



Program Prioritas Pembangunan terdiri dari 2 Program 5 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan antara lain :

1. Program Kepegawaian Daerah

1.1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- a. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
- b. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- c. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- d. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- f. Pengelolaan Data Kepegawaian

1.2 Mutasi dan Promosi ASN

- a. Pengelolaan Mutasi ASN
- b. Pengelolaan Promosi ASN
- c. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

1.3 Pengembangan Kompetensi ASN

- a. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- b. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

1.4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- b. Pengelolaan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
- c. Pembinaan Disiplin ASN
- d. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN



2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.1 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama Pengembangan Kompetensi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
- b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 4.1



Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kotabaru

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)					(3)	(5)	(4)	(6)	(7)		(8)	(9)	
						BELANJA DAERAH				47.746.186.381			47.310.854.215	
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				34.774.054.130			32.670.496.815	
5	3					KEPEGAWAIAN				34.774.054.130			32.670.496.815	
5	3	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				34.774.054.130			32.670.496.815	
5	3	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				215.646.848			217.000.000	
1	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	10 Dokumen	47.896.150	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	55.000.000	
2	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	9.012.748	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000	
3	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	13.709.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000	
4	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	7.390.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000	
5	5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	12.658.300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000	
6	5	03	01	2.02	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kotabaru	32 Laporan	79.822.750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	32 Laporan	75.000.000	
7	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	7 Laporan	45.157.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Laporan	65.000.000	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)					(3)	(5)	(4)	(6)	(7)		(8)	(9)	
	5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.419.960.082			29.260.796.815	
8	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotabaru	45 Orang/bulan	12.756.753.732	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		45 Orang/bulan	13.136.696.815
9	5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kotabaru	12 Dokumen	594.530.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	15.364.100.000
10	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kotabaru	12 Dokumen	41.371.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	700.000.000
11	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotabaru	2 Laporan	6.867.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Laporan	10.000.000
12	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kotabaru	18 Laporan	18.578.250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		16 Laporan	45.000.000
13	5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	1.859.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000
	5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				639.174.000			450.000.000	
14	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kotabaru	183 Paket	202.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100 Paket	250.000.000
15	5	03	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Kab. Kotabaru	7 Orang	101.694.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7 Orang	120.000.000
16	5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotabaru	300 Orang	91.724.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		300 Orang	80.000.000
17	5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotabaru	20 Orang	243.555.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		20 Orang	243.555.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)					(3)	(5)	(4)	(6)	(7)		(8)	(9)	
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.346.201.850			1.114.000.000	
18	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kotabaru	6 Paket	15.546.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6 Paket	22.000.000
19	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kotabaru	12 Paket	107.971.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		24 Paket	120.000.000
20	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kotabaru	13813 Paket	608.773.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		14000 Paket	350.000.000
21	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kotabaru	6 Paket	58.054.850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6 Paket	65.000.000
22	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kotabaru	12 Dokumen	7.560.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	8.500.000
23	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kotabaru	12 Laporan	22.980.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Laporan	36.000.000
24	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotabaru	1185 Laporan	525.317.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		110 Laporan	487.000.000
25	5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	25.500.000
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				571.354.500			650.000.000	
26	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kotabaru	123 Unit	407.630.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Unit	60.000.000
27	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kotabaru	13 Unit	78.020.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		30 Unit	530.000.000
28	5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kotabaru	18 Unit	85.704.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		9 Unit	60.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)					(3)	(5)	(4)	(6)	(7)		(8)	(9)	
	5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				18.129.450.000			575.000.000	
29	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotabaru	12 Laporan	37.725.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Laporan	33.500.000	
30	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kotabaru	12 Laporan	121.040.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	89 Laporan	146.500.000	
31	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kotabaru	12 Laporan	17.970.685.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Laporan	395.000.000	
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				452.266.850			403.700.000	
32	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kotabaru	6 Unit	201.616.850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Unit	150.000.000	
33	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kotabaru	1 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	160.000.000	
34	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Kotabaru	41 Unit	27.450.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	39 Unit	25.000.000	
35	5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kotabaru	34 Unit	73.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	28 Unit	68.700.000	
	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				6.473.057.992			5.405.142.400	
	5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.718.079.720			1.327.100.000	
36	5	03	02	1.01	0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	49.892.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50.000.000	
37	5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	59.985.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	60.000.000	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)					(3)	(5)	(4)	(6)	(7)		(8)	(9)	
38	5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	788.048.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	551.000.000
39	5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Kotabaru	100 Dokumen	237.897.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		180 Dokumen	110.000.000
	5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	Kab. Kotabaru	6 Lembaga	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6 Lembaga	15.000.000
40	5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kotabaru	14 Dokumen	528.847.920	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	486.100.000
41	5	3	2	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	53.409.100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	55.000.000
	5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN				1.011.578.400				803.600.000
42	5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	49.999.950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50 Dokumen	50.000.000
43	5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	451.578.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	250.000.000
44	5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	509.999.950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		200 Dokumen	503.600.000
	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN				2.319.776.450				2.310.000.000
45	5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Kotabaru	20 Orang	2.199.995.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		40 Orang	2.230.000.000
46	5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Kotabaru	1000 Orang	119.780.950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	80.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)					(3)	(5)	(4)	(6)	(7)		(8)	(9)	
	5	3	2	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1.423.623.422			964.442.400	
47	5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kotabaru	9 Dokumen	1.109.986.522	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Dokumen	680.000.000	
	5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Kotabaru	63 Orang	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Orang	70.000.000	
48	5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kab. Kotabaru	300 Orang	99.991.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Orang	52.512.400	
49	5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kab. Kotabaru	1100 Orang	106.252.250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1100 Orang	80.000.000	
50	5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kotabaru	10 Laporan	107.393.650	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Laporan	75.000.000	
	5	03	02	1.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.930.000	
	5	04	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6.499.074.259			9.235.215.000	
	5	04	2	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				-			198.500.000	
51	5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Kotabaru	55 Orang	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	55 Orang	198.500.000	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)					(3)	(5)	(4)	(6)	(7)		(8)	(9)	
	5	04	2	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				6.499.074.259			9.036.715.000	
52	5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional yang disusun	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	770.829.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	808.000.000
53	5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Kotabaru	7 Laporan	5.728.244.759	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100 Orang	8.228.715.000